

LKJIP
Laporan kinerja instansi pemerintah
Bapenda Kabupaten pemalang
Tahun 2021



BAPENDA Kabupaten Pemalang
Jalan surohadikusumo no. 1 pemalang
Telp.0284 321244

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. LKjIP Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap perangkat daerah. Laporan ini juga memiliki fungsi sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran atas tingkat pencapaian perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan hingga di masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 baik tenaga dan pikirannya diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga ini dapat memberikan manfaat yang optimal.

Pemalang, 31 Desember 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



Drs. MUBARAK AHMAD, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690121 199001 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam transisi Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategis, kebijakan, program dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam rencana strategis, dengan **Sasaran : Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efesien dalam pemanfaatan APBD.**

Adapun ringkasan prestasi kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang yang dicapai di tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pada APBD Tahun Anggaran 2021 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang mendapatkan alokasi sebesar Rp. 11.744.377.000,00 dan terserap sebesar Rp.11.496.818.319,00 atau 97,89 % efisiensi sebesar Rp.247.558.681,00 atau (2,11%), untuk membiayai 2 program , 6 kegiatan dan 40 sub kegiatan.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bapenda Kabupaten Pemalang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai koordinator untuk merumuskan kebijakan dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD) target Tahun 2021 Rp.307.180.642.000,00 realisasi Rp.365.401.063.510,00 (118,95%), dan melaksanakan kewenangannya dalam pemungutan pajak daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (Sewa Tanah Eks Bondo Desa). Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target Rp.307.180.542.000,00 relisasinya Rp.365.401.063.510,00 (118,95%) yang dikelola Bapenda Kabupaten Pemalang yaitu **11 Pajak Daerah dari target Rp.82.822.262.000,00, realisasi Rp.88.731.761.139,00,- (107,14%) dan Lain-lain Pendapapatan Asli Daerah (Sewa**

tanah eks bondo desa) target Rp.3.750.000.000 dengan realisasi Rp.3.095.888.341,00,- (82,56 %)..

3. Analisis terhadap sasaran strategis dan indikator yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang untuk mewujudkan tujuan strategis pada akhir masa renstra tahun 2021, adapun capaian kinerjanya sebagai berikut :

a. Indikator Rasio realisasi PAD terhadap potensi/target PAD

Tahun 2021 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang menargetkan sebesar 7,80%, untuk indikator Rasio realisasi PAD terhadap potensi/target PAD adapun realisasinya adalah sebesar 6,07%

b. Indikator Peningkatan/Pertumbuhan PAD

Tahun 2021 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang menargetkan sebesar 6,20%, untuk indikator Peningkatan/Pertumbuhan PAD adapun realisasinya adalah sebesar 10,13%.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini penting untuk dipergunakan sebagai pijakan bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Pemalang, 31 Desember 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



Drs. MUBARAK AHMAD, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690121 199001 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	ix
Daftar Lampiran	x
BAB. I. PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum Organisasi	2
1. Struktur Organisasi	2
2. Tugas Pokok dan Fungsi	4
B. Isu Strategis	6
C. Keuangan	8
BAB. II. PERENCANAAN KINERJA	10
A. Perencanaan Strategis	10
1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	12
2. Strategis dan Arah Kebijakan	15
B. Perjanjian Kinerja	16
C. Rencana Anggaran	17
BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja Organisasi	26
B. Akutabilitas Anggaran	31
1. Realisasi Anggaran	31
2. Analisis Efisiensi Sumber Daya	33

	C. Inovasi	43
BAB. IV.	Penutup	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kondisi Kepegawaian Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Berdasarkan Tingkat Golongan	5
Tabel 1.2 Kondisi Kepegawaian Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	5
Tabel 1.3 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021.....	6
Tabel 1.4 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021.....	8
Tabel 1.5 Target dan Realisasi PAD Yang Dilaksanakan Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021	8
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021	13
Tabel 2.2 Tujuan dan indikator Tujuan Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026	14
Tabel 2.3 Sasaran dan Indikator Sasaran Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026	14
Tabel 2.4 Strategi dan Arah Kebijakan Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021	15
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021.....	16
Tabel 2.6 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan APBD Tahun 2021 Bapenda Kabupaten Pemalang	17
Tabel 3.1 Capaian indikator Kinerja atas Perjanjian Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021	26
Tabel 3.2 Capaian indikator Kinerja atas Perjanjian Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021	27
Tabel 3.3 Capaian indikator Kinerja 2 atas Perjanjian Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021	28
Tabel 3.4 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021	29
Tabel 3.5 Capaian Realisasi Lain-Lain PAD Sewa Tanah Eks Bondo Desa Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021	30
Tabel 3.6 Target dan Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021	32
Tabel 3.7 Target Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Capaian Sasaran Strategis Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021	33

Tabel 3.8 Penyerapan Anggaran Per Program dan Kegiatan Bapenda Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021	34
Tabel 3.9 Realisasi Penggunaan Energi Listrik Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021.....	41
Tabel 3.10 Realisasi Penggunaan Energi Air (PDAM) Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021	42

DAFTAR GARFIK

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang Hari Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Hari.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang Hari Tahun 2021 diharapkan dapat bermanfaat untuk :

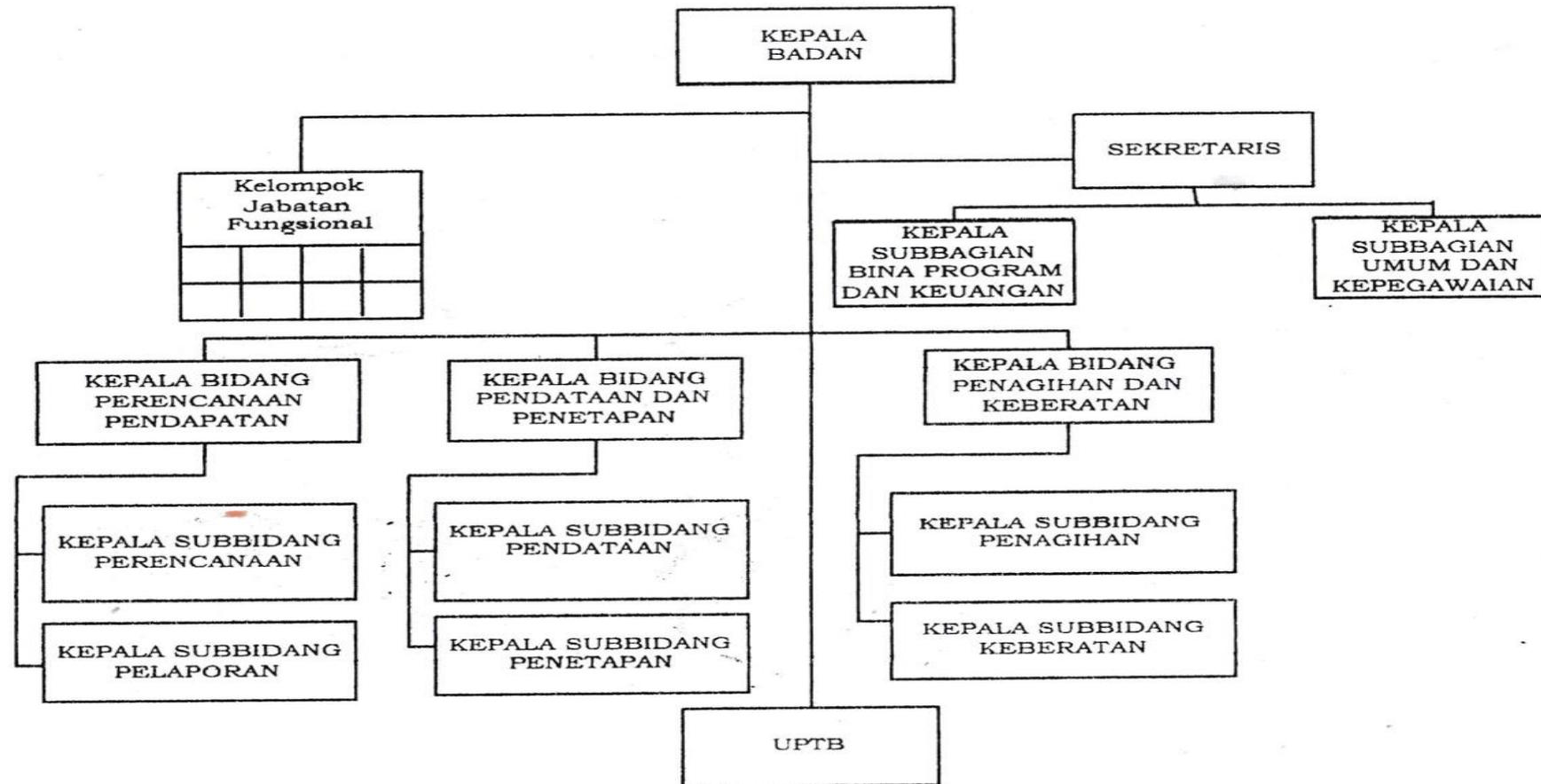
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi manfaat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang Hari.
2. Mendorong Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang Hari didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang Hari untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang Hari dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1 Struktur Organisasi

Badan Pengelolaan Pendapatan BupatiKabupaten Pematang terbetuk berbasarkan Peraturan Daerah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang. Berdasarkan peraturan daerah tersebut Susunan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematangadalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Bina Program dan Keuangan.
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perencanaan Pendapatan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan.
 - 2) Sub Bidang Pelaporan
- d. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pendataan.
 - 2) Sub Bidang Penetapan
- e. Bidang Penagihan & Keberatan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Penagihan.
 - 2) Sub Bidang Keberatan.
- f. UPTB;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Pemalang

2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Pematang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang, bahwa Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung kelancaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang hingga akhir Desember 2021 memiliki pegawai sebanyak 62 orang yang terdiri dari laki-laki 50 orang, perempuan 12 orang, tersebar pada sekretariat dan bidang-bidang dengan komposisi dapat dilihat pada tabel 1.1 dan tabel 1.2, untuk Rekapitulasi sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel 1.3 sedangkan anggaran belanja tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 1.4, sebagai berikut :

Tabel : 1.1
Kondisi Kepegawaian Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021
Berdasarkan Tingkat Golongan

No	Uraian	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1.	Kepala Badan	-	-	-	1	1
2.	Sekretariat	1	2	7	1	11
3.	Bidang Perencanaan Pendapatan	-	-	4	1	5
4.	Bidang Pendataan dan Penetapan	-	2	5	1	8
5.	Bidang Penagihan dan Keberatan	-	23	6	1	37
	Jumlah	1	27	22	5	62

Sumber : Bapenda Tahun 2021

Tabel : 1.2
Kondisi Kepegawaian Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	SLTP	SLTA	D.3	S-1	S-2	Jml
1.	Kepala Badan	-	-	-		1	1
2.	Sekretariat	1	2	-	7	1	11
3.	Bidang Perencanaan Pendapatan	-	-	-	3	2	5
4.	Bidang Pendataan dan Penetapan	-	3	1	3	1	8
5.	Bidang Penagihan dan Keberatan	-	30	1	5	1	37
	Jumlah	1	35	2	18	6	62

Sumber : Bapenda Tahun 2021

Tabel. 1.3

Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021

No.	Jenis	Jumlah	Anggaran (Rp)
1	Tanah	1	1.575.000.000,00
2	Peralatan dan mesin	531	5.811.386.1758,00
3	Gedung dan bangunan	3	1.214.103.500,00
4	Jalan, irigasi dan jaringan	3	74.168.100,00
5	Aset tetap lainnya	5	1.734.500,00
	Jumlah		8.676.392.275,00

Sumber : SIM Barang Milik Daerah (BMD) 31 Desember 2021

Pada tahun 2021 rekapitulasi sarana dan prasarana di Bapenda Kabupaten Pemalang total mencapai (jenis/buah) dengan nilai sebesar Rp.8.676.392.275,00 (Delapan milyar enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), sarana prasarana tersebut terdiri dari KIB A, KIB B, KIB C, KIB D dan KIB E , untuk diketahui bahwa KIB. A adalah tentang tanah, KIB B tentang peralatan dan mesin, KIB C tentang gedung dan bangunan, KIB D tentang jalan, irigasi dan jembatan dan KIB E tentang aset tetap lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bapenda Kabupaten Pemalang.

B. ISU STRATEGIS

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu strategis dapat diidentifikasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah menetapkan jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang bisa dipungut oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah tidak bisa menetapkan pemungutan pajak dan retribusi selain yang sudah ditetapkan. Kondisi tersebut menjadikan Bapenda Kabupaten Pemalang harus lebih kreatif dalam mengoptimalkan upaya intensifikasi dalam menggali potensi dari masing-masing jenis pajak dan retribusi yang jenisnya sudah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bapenda Kabupaten Pemalang sebagai koordinator untuk merumuskan kebijakan dalam hal pengelolaan

Pendapatan Asli Daerah, namun kewenangannya dalam melaksanakan Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (Sewa Tanah Eks Bondo Desa). Isu strategis dapat diidentifikasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang karena belum optimalnya sumber sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk meningkatkan realisasi penerimaan PAD ada permasalahan yang harus dioptimalkan pengelolaannya antara lain :

- 1) Belum optimalnya data atau laporan untuk menunjang kinerja pemerintah;
- 2) Beberapa regulasi yang terkait dengan pengelolaan pendapatan perlu dilakukan review seiring dengan perkembangan kelembagaan serta terbitnya produk hukum tingkat atasnya, selain itu belum cukup tersedianya produk hukum yang berkaitan dengan strategi optimalisasi pendapatan daerah, dan Standar Operasional Prosedur mengenai pelayanan pajak daerah yang dapat dijadikan acuan kerja sehingga memudahkan untuk melakukan upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja;
- 3) Belum memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia khususnya dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, karena institusi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan baru terbentuk pada awal tahun 2017, dimana didalamnya banyak pegawai yang baru masuk, sehingga belum menguasai permasalahan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM ini juga disebabkan terbitnya berbagai regulasi baru tentang pendapatan daerah sehingga persepsi yang belum merata dari setiap pegawai tentang regulasi tersebut;
- 4) Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah, terutama dalam memperhitungkan membayar dan melaporkan pajak/retribusi daerah dengan benar, termasuk dalam melakukan porporasi karcis/bill/nota penjualan serta melaporkan secara teratur bonggol karcis/bill/nota penjualan dan sisa karcis/bill/nota penjualan yang tidak laku setiap bulannya, termasuk dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah.
- 5) Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang pembayaran pajak daerah sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham akan kemudahan dalam membayar pajak daerah;
- 6) Belum validnya data wajib pajak, karena masih memakai data dari KPP Pratama pelimpahan PBB-P2 tahun 2013 dan dalam hal terjadi jual beli tanah dan bangunan tidak dibarengi secara langsung proses balik nama dari pihak penjual ke pihak pembeli sehingga sering kesulitan melacak pemilik yang baru yang mengakibatkan timbulnya piutang pajak;

7) Belum optimalnya Pengelola Sistem Informasi daerah.

C. KEUANGAN

Berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Bapenda sebagai Koordinator pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2021 target PAD sebesar Rp.307.180.542.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.365.401.063.510,00 (118,95 %) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel.1.4

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi(Rp)	(%)
1	Pendapatan Pajak Daerah	82.822.262.000,00	88.731.761.139,00	107,14
2.	Retribusi Daerah	34.036.643.000,00	28.569.342.183,00	83,94
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	22.500.842.000,00	22.500.844.418,00	100,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	167.820.795.000,00	225.599.115.770,00	134,43
	JUMLAH	307.180.542.000,00	365.401.063.510,00	18,95

Sumber : SIMDA Tahun 2021

Tabel.1.5

Target dan Realisasi PAD Yang Dilaksanakan Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi(Rp)	(%)
1	Pendapatan Pajak Daerah	82.822.262.000,00	88.731.761.139,00	107,14
2.	Sewa Eks Bondo Desa	3.750.000.000,00	3.095.888.341,00	82,56
	Jumlah	86.572.262.000,00	91.827.649.480,00	106,07

Pada Tahun Anggaran 2021 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang Mendauh mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp.11.744.377.000,00 rincian sebagai berikut :

- ***Belanja Tidak Langsung***

Keseluruhan belanja tidak langsung teralokasi pada belanja gaji pegawai yang bersifat tetap sebesar Rp.9.875.615.000,00

- ***Belanja Langsung***

Belanja langsung sebesar Rp.1.868.762.000,00 yang diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program /kegiatan utama yang berkaitan langsung dengan sasaran strategis maupun program/kegiatan pendukung.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang merupakan manifestasi komitmen Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang dalam mendukung Visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pemalang terpilih periode 2016-2021 yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Bapenda Kabupaten Pemalang, guna mewujudkan apa yang dicita citakan adalah “**Terwujudnya Pemalang hebat yang berdaulat, berjatidiri, mandiri dan sejahtera**” adapun pengertiannya sebagai berikut :

- a. Terwujudnya **Pemalang hebat** merupakan suatu kondisi dimana harapan, keinginan, cita-cita yang diangankan menjadi nyata. Pemalang hebat merupakan ultimate goal yang dibangun dari kondisi Pemalang yang berdaulat, berjatidiri, mandiri dan sejahtera. Pemalang hebat juga menjadi tagline pembangunan dalam mengacu semangat, percepatan dan sinergitas para stakeholders terkait dalam mengupayakan perwujudan pembangunan Pemalang.
- b. **Berdaulat** diartikan sebagai kemampuan pemerintah dan masyarakat Pemalang yang mampu membangun, mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat dan gotong royong, dengan tetap memperhatikan sinergitas pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik serta penegakan supremasi hukum.
- c. **Berjatidiri** diartikan sebagai pembangunan Pemalang yang memiliki keunggulan yang berbasis local wisdom/local value dengan menumbuhkan kembali seni dan kebudayaan asli daerah sebagai landasan pembentukan jatidiri dan kepribadian masyarakat Pemalang yang agamis, harmonis dan saling menghormati.
- d. **Mandiri** diartikan sebagai pembangunan Pemalang yang mengandalkan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki, meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan, pengembangan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal.

- e. **Sejahtera** diartikan sebagai kondisi masyarakat Pemalang yang berkualitas, peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat yang didukung daya saing masyarakat dan keberdayaan perempuan dan perlindungan dan perlindungan anak.

Dalam mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 7 Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak;
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah;
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati;
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah;
7. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat.

Telaahan terhadap visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Bapenda Kabupaten Pemalang, hal ini ditunjukkan melalui pernyataan misi ke-6 yaitu : ***“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah”***.

Peran serta Bapenda dalam misi dimaksud adalah mewujudkan tata kelola keuangan daerah sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari KKN, prima dalam melayani masyarakat, serta meningkatnya kapasitas aparatur dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Sesuai dengan tugas Bapenda Kabupaten Pemalang terkait dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tersebut diatas adalah **“membantu Bupati dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah”** .

Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang merupakan manisvestasi komitmen Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalangdalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang (RPJMD) Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan , sasaran dan strategi bagi penyelenggaran program dan kegiatan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalangyang harus dilaksanakan secara terpadu ,sinergis , harmonis dan berkesinambungan. Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten PemalangTahun 2016-2021 maka tahun 2020 merupakan tahun keempat dalam pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang.

1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Mendasari visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021, memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Bapenda Kabupaten Pemalang, hal ini ditunjukkan melalui pernyataan misi ke-6 yaitu : **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah”**.Yang selanjutnya

Dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagai berikut :

Tujuan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang **“ Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisien dalam pemanfaatan APBD “**.

Tabel : 2.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target
1.	Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisien dalam pemanfaatan APBD	Rasio peningkatan PAD	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisien dalam pemanfaatan APBD	1	Persentase realisasi PAD terhadap pendapatan	7,80 %
				2	Rasio pertumbuhan PAD	6,20 %

Pada tahun 2021 merupakan masa terakhir pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 dan tahun 2021 merupakan transisi ke RPJMD Tahun 2021-2026

Adapun visi Kabupaten Pemalang yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Pemalang Yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”**.

Sedangkan misi Kabupaten Pemalang yang menjadi rujukan untuk Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang yaitu : **Misi 2 “Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih”**.

Mengacu pada visi dan misi Kabupaten Pemalang yang dijadikan rujukan serta telah dianalisis dan dikaji secara komprehensif, maka dapat dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026 yaitu :

Tujuan :“Meningkatkan tata kelola pendapatan daerah yang efektif, transparan dan akuntabel”

Sedangkan *indikator tujuannya yaitu Rasio Peningkatan PAD* dengan target 6,2 %, dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.2

Tujuan dan indikator Tujuan Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Awal	Target					Target Akhir
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan tata kelola pendapatan daerah yang efektif, transparan dan akuntabel	Rasio peningkatan PAD	6,15%	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%

Sasaran: Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan asli daerah, dengan *indikator sasaran yaitu Rasio PAD terhadap pendapatan daerah* dengan target 13,5 %

Tabel: 2.3

Sasaran dan Indikator Sasaran Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Awal	Target					Target Akhir
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan asli daerah	Pesentase PAD terhadap pendapatan daerah	12,72 %	13,50 %	13,50 %	13,50 %	13,50 %	13,50 %	13,50 %

2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai . cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.

Tabel : 2.4
Strategi dan Arah Kebijakan Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021

Visi	Terwujudnya Pemalang Hebat yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera					
Misi	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah					
Tujuan		Sasaran		Strategi		Kebijakan
Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisien dalam pemanfaatan APBD	1	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisien dlm pemanfaatan APBD	1	Meningkatkan pemahaman tentang tugas dan fungsi Pendelegasian tugas dan wewenang pada masing-masing Bidang tugas;	1	Pelaksanaan Intensifikasi dalam pemungutan Pajak Daerah dan retribusi daerah berdasarkan potensi yang ada
			2	Melakukan koordinasi yang intensif dengan instansi terkait	2	Optimalisasi pemanfaatan asset tanah sawah eks bondu desa yang berubah statusnya mejadi kelurahan, agar dapat memberikan kontribusi secara signifikan dalam peningkatan PAD
			3	Menyusun sirdur yg efektif, efisien & mudah dipahami & diterapkan	3	Pengembangan basis datadatanpotensipajakdaerah agar valid dan up to date

B. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja 2021 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang disusun berdasar pada RPJMD Tahun 2016-2026, Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021, RKT, IKU dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2021 sebesar Rp.11.744.377.000,00, dengan rincian : Sekretariat (Program Urusan Pemerintahan) Rp.10.785.674.000,00 terdiri dari Gaji dan tunjangan sebesar Rp.9.875.615.000,00 dan kegiatan/sub kegiatan sebesar Rp.910.059.000,00 dan Bidang-bidang (Program Pengelolaan Pendapatan Daerah) sebesar Rp.958.703.000,00. Adapun Perjanjian Kinerja Bapenda Kabupaten Pemalang pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.5
Perjanjian Kinerja Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran (RP)
1.	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisien dalam pemanfaatan APBD	1	Persentase Realisasi PAD terhadap potensi/target PAD	%	7,80	11.744.377.000
		2	Peningkatan/Perumbuhan PAD	%	6,20	

Sumber : Perjanjian Kinerja Bapenda Tahun 2021

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021

Bapenda Kabupaten Pemalang pada tahun 2021 telah melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 13.848.460.000,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung (Gaji dan tunjangan) Rp.10.664.460.000,00 dan Belanja Langsung Rp.3.184.000.000,00. Melalui mekanisme perubahan APBD Tahun 2021 dengan adanya wabah Covid 19 menjadi Rp.11.744.377.000,00 pengurangan sebesar Rp.2.104.083.000,00 (15,19 %) dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp.9.875.615.000,00 dan Belanja Langsung Rp.1.868.762.000,00.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang melalui APBD Tahun Anggaran 2021 dan APBD perubahan 2021 sebagai berikut :

Tabel : 2.6
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan APBD Tahun 2021
Bapenda Kabupaten Pemalang

NO	KODE REKENING PROGRAM /KEGIATAN	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
	5.02.	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		13.848.460.000	11.744.377.000	(2.104.083.000)	(15,19)
	5.02.01	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan D</i>		12.197.312.500	10.785.674.000	(1.411.638.500)	(11,57)
I	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	112.306.300	43.000.000	(69.306.300)	(61,71)
1	5.02.01.2.0	Penyusunan dokumen	3 dok	60.000.00	13.739.700		(76,8)

NO	KODE REKENING PROGRAM /KEGIATAN	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
	1.01	perencanaan perangkat daerah		0		(46.128.100)	8)
2	5.02.01.2.0 1.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dok	4.500.000 0	4.500.0000	0	0,00
3	5.02.01.2.0 1.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokt	5.500.000	5.500.000	0	0,00
4	5.02.01.2.0 1.04	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dok	4.500.000	4.500.000	0	0,00
5	5.02.01.2.0 1.05	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dok	5.500.000	5.500.000	0	0,00
6	5.02.01.2.0 1.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 dokumen	32.306.30 0	9.128.100	(23.178.200)	(71,75)
II	5.02.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		10.664.46 0.000	9.883.615.0 00	(780.845.00 0)	(7,32)
1	5.02.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	10.648.46 0.000	9.875.615.0 00	(722.845.00 0)	(7,26)
2	5.02.01.2.0 2.05	Koordinasi dan penyusunan	15 buku	11.000.00 0	3.000.000		(72,73)

NO	KODE REKENING PROGRAM /KEGIATAN	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
		laporan keuangan akhir tahun SKPD				(8.000.000)	
3	5.02.01.2.0 2.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan an/ semesteran SKPD	18 laporan	5.000.000	5.000.000	0	0,00
III	5.02.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah		298.931.200	230.575.650	(68.355.550)	(22,87)
1	5.02.01.2.0 6.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1 paket	5.890.700	5.846.700	(43.300.000)	(0,74)
2	5.02.01.2.0 6.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 unit	3.275.600	0	(3.275.600)	(100)
3	5.02.01.2.0 6.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	10 unit	6.403.600	2.874.100	(3.529.500)	(55,12)
4	5.02.01.2.0 6.04	Penyediaan bahan logistik kantor	3 jenis	144.298.000	77.079.025	(67.218.975)	(46,58)
5	5.02.01.2.0 6.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 paket	20.000.000	15.004.500	(4.995.500)	(24,98)
6	5.02.01.2.0 6.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	12 bulan	14.100.000	14.100.000	0	0,00

NO	KODE REKENING PROGRAM /KEGIATAN	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
		perundang-undangan					
7	5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	24 kalit	104.964.000	115.671.325	10.707.325	10,20
IV	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		233.172.000	48.944.000	(184.288.000)	(79,01)
1	5.02.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	4 unit	120.852.000	0	(120.852.000)	(100)
2	5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebelair	1 unit	12.320.000	2.000.000	(10.320.000)	(83,77)
3	5.02.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	6 unit	100.000.000	46.944.000	(53.056.000)	(53,06)
V	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		507.018.000	439.768.000	(67.250.000)	(13,26)
1	5.02.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000 surat	3.000.000	3.000.000	0	0,00
2	5.02.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bln	159.018.000	123.018.000	(36.000.000)	(22,64)

NO	KODE REKENING PROGRAM /KEGIATAN	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
3	5.02.01.2.0 8.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	345.000.000	313.750.000	(31.250.000)	(9,06)
V	5.02.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daeeah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		374.425.000	139.771.350	(234.653.650)	(62,67)
1	5.02.01.2.0 9.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 unit	27.000.0001	25.801.500	(1.198.500)	(4,44)
2	5.02.01.2.0 9.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan , pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	59 unit	91.974.000	50.007.200	(41.966.800)	(45,63)
3	5.02.01.2.0 9.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	55 Unit	112.267.000	40.000.000	(72.267.000)	(64,37)
4	5.02.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 unit	100.000.000	10.000.200	(89.000.800)	(90,00)

NO	KODE REKENING PROGRAM /KEGIATAN	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
5	5.02.01.2.0 9.10	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	5 unit	40.594.000	13.062.450	(27.531.550)	(67,82)
6	5.02.01.2.0 9.11	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	23 unit	2.590.000	900.000	(1.690.000)	(65,25)
	5.02.04.2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		1.651.147.500	958.703.000	(692.444.500)	(41,94)
1	5.02.04.2.0 1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		1.651.147.500	958.703.000	(692.444.500)	(41,94)
1	5.02.04.2.0 1.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	2 dokumen	80.000.000	32.850.000	(47.150.000)	(58,94)
2	5.02.04.2.0 1.02	Analisa dan pengembangan pajak daerah , serta penyusunan kebijakan pajak daerah	6 dokumen	120.000.000	59.787.000	(60.213.000)	(50,18)
3	5.02.04.2.0 1.03	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	240 unit	110.000.000	82.000.000	(28.000.000)	(25,45)

NO	KODE REKENING PROGRAM /KEGIATAN	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
4	5.02.04.2.0 1.04	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	1 unit	100.000.000	58.800.000	(41.200.000)	(41,20)
5	5.02.04.2.0 1.05	Pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah	150 data	80.000.000	41.740.700	(38.259.300)	(47,82)
6	5.02.04.2.0 1.06	Pengolahan pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	300 data	10.000.000	25.505.000	15.505.000	155,05
7	5.02.04.2.0 1.07	Penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	12 bulan	25.000.000	9.425.000	(15.575.000)	(62,30)
8	5.02.04.2.0 1.08	Penetapan wajib pajak daerah	700.000 data	357.550.000	270.913.400	(86.636.600)	(24,23)
9	5.02.04.2.0 1.09	Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	12 bulan	21.097.500	6.880.000	(14.217.500)	(67,39)
10	5.02.04.2.0 1.10	Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	12 bulan	25.000.000	7.935.900	(17.064.100)	(68,26)
11	5.02.04.2.0 1.11	Penagihan pajak daerah	12 kegiatan	277.289.000	157.289.000	(120.000.000)	(43,28)

N O	KODE REKENING PROGRAM /KEGIATAN	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	TARG ET KINER JA	ANGGAR AN PENETA PAN	ANGGARA N SETELAH PERUBAH AN	BERTAMB AH/ (BERKURA NG)	%
1 2	5.02.04.2.0 1.12	Penyelesaian keberatan pajak daerah	80 permo honan	40.000.00 0	25.250.000	(14.750.000)	(36,8 8)
1 3	5.02.04.2.0 1.13	Pengendalian , pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	12 kegiata n	305.211.0 00	172.164.00 0	(133.047.00 0)	(43,5 9)
1 4	5.02.04.2.0 1.14	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	1 kegiata n, 4 kegiata n	100.000.0 00	8.163.000	(91.837.000)	(91,8 4)

Sumber : DPA Tahun 2021

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar yang menopang pemerintahan menuju good governance sehingga mampu menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kerangka pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Pemalang dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

A CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021, selanjutnya IKU tersebut menjadi kerangka acuan untuk menetapkan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dihitung persentase capaian kinerjanya guna menilai sejauh mana indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2021.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah menetapkan jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bapenda Kabupaten Pemalang sebagai koordinator untuk merumuskan kebijakan dalam hal pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, namun kewenangannya dalam melaksanakan **Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (Sewa Tanah Eks Bondo Desa)**.

1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang, diharapkan semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dihitung persentase capaian kinerjanya guna menilai sejauh mana indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2021, capaian indikator kinerja utama dan indikator program dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1

Capaian indikator Kinerja atas Perjanjian Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi indikator (%)	Keterangan
1	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisien dalam pemanfaatan APBD	1 Rasio Realisasi PAD terhadap potensi/target PAD	7,80	6,07	Bapenda
		2 Peningkatan Pertumbuhan PAD	6,20	10,13	

2 KAJIAN PERENCANAAN DAN ANALISA

Analisa capaian dilakukan terhadap capaian indikator kinerja utama dan program yang berpengaruh terhadap perwujudan sasaran strategis. Analisa juga dilakukan dengan membandingkan capaian tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 serta mengkaitkannya dengan dengan kemungkinan tercapainya sasaran tahun terakhir Renstra tahun 2016-2021.

Analisi terhadap sasaran strategis dan indikator yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang untuk mewujudkan tujuan strategis pada akhir masa renstra tahun 2021 sebagai berikut :

Sasaran strategis :

Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisien dalam pemanfaatan APBD

1. Dengan realisasi indikator sebesar 6,07%, maka belum memenuhi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebesar 7,80%, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2

Capaian indikator Kinerja atas Perjanjian Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi indikator (%)	Keterangan
1	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisien dalam pemanfaatan APBD	1 Rasio Realisasi PAD terhadap potensi/target PAD	7,80	6,07	Bapenda

Dengan realisasi indikator sebesar 6,07%, maka belum memenuhi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebesar 7,80%, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat antara lain :

- 1) Adanya wabah pandemi covid 19, kondisi ini menyebabkan lemahnya perekonomian masyarakat, menurunnya kemampuan dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2) Kinerja pelayanan pajak yang belum memadai dibandingkan dengan tuntutan masyarakat yaitu masih terbatasnya tempat pelayanan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;

Utuk menyelesaikan kendala-kendala yang dialami tentunya Bapenda akan melaksanakan upaya-upaya dalam mencapai keberhasilan antara lain :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik, menerapkan protokol kesehatan dengan pengecekan suhu badan dan 3 M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak)

- 2) Memperbanyak tempat pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah untuk mempermudah pelayanan pembayaran pajak selain melalui Bank Jateng juga dapat melalui Alfamart dan Indomart yang tersebar sampai ke pelosok wilayah Kab Pemalang;
2. Pada tahun 2021 realisasi Peningkatan/Pertumbuhan PAD capaian kinerjanya 10,13%, sedangkan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan sesuai dengan target yang tertuang dalam Renstra Bapenda Kabupaten Pemalang pada Tahun 2021 sebesar 6,20%.

Tabel 3.3

Capaian indikator Kinerja 2 atas Perjanjian Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi indikator (%)	Keterangan
1	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisien dalam pemanfaatan APBD	1 Peningkatan Pertumbuhan PAD	6,20	10,13	Bapenda

Dalam pencapaiannya indikator 2 yaitu peningkatan/pertumbuhan PAD sangat Baik capaiannya, adapun faktor-faktor yang menjadi pendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah antara lain :

- 1) Kerjasama yang baik antar bidang maupun instansi;
- 2) Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak dan retribusi daerah

Akuntabel dan transparan serta efisien dalam pemanfaatan APBD pada indikator Rasio realisasi PAD terhadap potensi/target PAD didukung oleh 2 program yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan anggaran Rp. 10.785.674.000,00 realisasi Rp.10.557.438.419,00 atau 97,88 % sisa anggaran sebesar Rp.228.235.581 efisiensi sebesar 2,12 %

- 2) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah anggaran Rp. 958.703.000,00 realisasi sebesar Rp.939.379.900,00 atau 97,98 % sisa anggaran Rp.19.323.100,00 efisiensi sebesar 2,02 %

Tabel : 3.4

**Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah
Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021**

No	Jenis Pajak	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pajak Hotel	Rp.	600.000.000,00	517.637.200,00	86,27
2	Pajak Restoran	Rp.	1.180.000.000,00	1.216.489.204,00	103,09
3	Pajak Hiburan	Rp.	370.000.000,00	131.434.227,00	35,52
4	Pajak Reklame	Rp.	1.600.000.000,00	1.489.385.737,00	93,09
5	Pajak Penerangan Jalan	Rp.	36.400.000.000,00	36.818.544.040,00	101,15
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp.	1.100.000.000,00	815.231.698,00	74,11
7	Pajak Parkir	Rp.	45.000.000,00	63.388.526,00	140,86
8	Pajak Air Bawah Tanah	Rp.	226.000.000,00	307.800.502,00	136,19
9	Pajak Sarang Burung Walet	Rp.	13.500.000,00	10.000.000,00	74,07
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	Rp.	20.487.762.000,00	21.327.825.300,00	104,10

No	Jenis Pajak	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
11	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp.	20.800.000.000,0 0	26.034.024.705,0 0	125,16
	Jumlah	Rp.	82.822.262.000,0 0	88.731.761.139,0 0	107,14

Dari data tabel diatas secara keseluruhan Pendapatan Asli Daerah dari pajak daerah terealisasi 88.731,761.139,00 % atau 107,14% dari target sebesar Rp.82.822.262.000,00. Realisasi tersebut meningkat 10,13%

Tabel : 3.5
Capaian Realisasi Lain-Lain PAD Sewa Tanah Eks Bondo Desa
Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021

No	Uraian	Target Semula (Rp)	Realisasi s/d 31 Desember 2021	(%) Capaian
2.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (Sewa Tanah Eks Bondo Desa)	3.175.000.000,0 0	3.095.888.341,00	82,56 %
	JUMLAH	3.175.000.000,0 0	3.095.888.341,00	82,56 %

Dari data tabel diatas Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dari sewa tanah eks bondo desa terealisasi 3.095,888,341,00 atau 82,56 % dari target sebesar Rp.3.175.000.000,00.

Capaian akuntabilitas kinerja pemerintah yaitu nilai evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Evaluator Inspektorat Kabupaten Pemalang terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bapenda Kabupaten Pemalang pada tahun 2019 memperoleh nilai atau skor sebesar 52,04 dengan kategori CC (Cukup) dan tahun 2020 mengalami peningkatan nilai sebesar 60,26 dengan kategori **B (Baik)** yang diartikan bahwa akuntabilitas kerjanya pada Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang sudah baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan, dengan hasil sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1.	Perencanaan Kinerja	30 %	17,72
2.	Pengukuran Kinerja	25 %	16,56
3.	Pelaporan Kinerja	15 %	9,80
4.	Evaluasi internal	10 %	3,71
5.	Capaian Kinerja	20 %	12,47
	Jumlah	100,00	60,26

Hasil Penilaian Implementasi Reformasi Birokrasi yang diperoleh merupakan PMPRB yang telah dinilai oleh evaluator Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan data dukung yang disampaikan serta implementasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adapun Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2021 sebesar 45,07 lebih rendah dari tahun 2020 sebesar 62,04

Dalam menyampaikan aspirasi, saran/masukan/kritik terhadap pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan roda pemerintahan di Kabupaten Pemalang melalui:

- SMS Center Nomor 0815 696 0020.

B. AKUNTABILITAS ANGGARAN

1. Realisasi anggaran

Dalam upaya untuk mengukur penilaian kinerja capaian keuangan selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung. Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja keuangan per sasaran strategis dihitung dengan membandingkan pagu dan realisasinya. Dari hasil

perhitungan tersebut dapat dianalisa tingkat efisiensi anggaran dari masing-masing capaian sasaran. Berikut ini adalah rekapitulasi capaian kinerja keuangan per sasaran :

Tabel .3.6
Target dan Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis
Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Tahun 2021		% Capaian
		Pagu	Realisasi	
1	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisien dalam pemanfaatan APBD	11.744.377.000,00	11.496.818.319,00	97,89 %
	Jumlah	11.744.377.000,00	11.496.818.319,00	97,89 %

Sumber : SIMDA Tahun 2021

Akuntabilitas selain dipandang dari segi kinerja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah, juga pengalokasian dan pemanfaatan anggaran tepat sasaran, dilakukan secara transparan dan hasil kinerjanya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia.

Pada APBD Tahun Anggaran 2021 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang mendapatkan alokasi sebesar Rp. 11.744.377.000,00, dan terserap sebesar Rp. 11.496.818.319,00 atau 97,89 % yang teralokasi pada :

- Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp.9.875.615.000,00 terserap Rp.9.662.723.863,00 atau 97,84 %.
- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.819.818.000,00 terserap Rp. 1.785.244.456,00 atau 98,10 %.
- Belanja Modal sebesar Rp. 48.944.000,00 terserap Rp. 48.850.000,00 atau 99,81 %

Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 2 Program, 6 kegiatan, dan 40 sub kegiatan yang mengarah sasaran strategis dalam kerangka pelaksanaan pencapaian kinerja Bapenda Kabupaten Pematang Jaya.

2. Analisis Efisiensi Sumberdaya

Efisiensi sumberdaya diasumsikan dapat tercapai apabila capaian kinerja telah terpenuhi 100% dan memiliki efisiensi anggaran. Adapun tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.3.7

**Target Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Capaian Sasaran Strategis
Bapenda Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Tahun 2021		Efisiensi	% Capaian
				Pagu	Realisasi		
1	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisien dalam pemanfaatan APBD	2		11.744.377.000,00	11.496.818.319,00	247.558.681,00	97,89
	Jumlah =	2		11.744.377.000,00	11.496.818.319,00	247.558.681,00	97,89

Sumber : SIMDA Tahun 2021

Berdasarkan tabel tersebut diatas, maka dapat diasumsikan bahwa untuk tahun 2021, dari 2 sasaran telah mencapai efisiensi sumber daya sebesar Rp.247.558.681,00 atau (2,11%), lebih

terincinya penyerapan anggaran untuk per program (2 program) dan 6 kegiatan dan 40 sub kegiatan tahun 2021 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel. 3.8

**Penyerapan Anggaran Per Program dan Kegiatan
Bapenda Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021**

NO	KODE REKENING PROGRAM /KEGIATAN	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
	5.02.	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		11.744.377.000	11.744.377.000	247.558.681	97,89
	5.02.01	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan D</i>		10.785.674.000	10.557.438.419	228.235.581	97,88
I	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	43.000.000	42.621.100	378.900	99,12
1	5.02.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dok	13.871.900	13.739.700	132.200	99,05
2	5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dok	4.500.000	4.499.800	200	100
3	5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan	1 dokt	5.500.000	5.419.900	80.100	98,54

NO	KODE REKENING PROGRAM /KEGIATAN	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
		dokumen perubahan RKA-SKPD					
4	5.02.01.2.0 1.04	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dok	4.500.000	4.495.800	4.200	99,91
5	5.02.01.2.0 1.05	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dok	5.500.000	5.417.900	82,100	98,51
6	5.02.01.2.0 1.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 dokumen	9.128.100	9.048.000	80.100	99,12
II	5.02.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		9.883.615 .000	9.670.723.8 63	212.891.13 7	97,85
1	5.02.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	9.875.615 .000	9.662.723.8 63	212.891.13 7	97,84
2	5.02.01.2.0 2.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	15 buku	3.000.000	3.000.000	0	100
3	5.02.01.2.0 2.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran	18 laporan	5.000.000	5.000.000	0	100

NO	KODE REKENING PROGRAM /KEGIATAN	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
		SKPD					
III	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		230.575.650	230.430.874	144,776	99,94
1	5.02.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	5.846.700	5.846.700	0	100
2	5.02.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 unit	0	0	0	0
3	5.02.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	10 unit	2.874.100	2.874.075	25	100
4	5.02.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	3 jenis	77.079.025	77.066.400	12.625	99,98
5	5.02.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 paket	15.004.500	15.004.500	0	100
6	5.02.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	14.100.000	14.100.000	0	100
7	5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	24 kalit	115.671.325	115.539.199	132.126	99,89
IV	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik		48.944.000	48.850.000	94.000	99,81

NO	KODE REKENING PROGRAM /KEGIATAN	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
		Daaerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
1	5.02.01.2.0 7.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	4 unit	0	0	0	0
2	5.02.01.2.0 7.05	Pengadaan Mebelair	1 unit	2.000.000	2.000.000	0	100
3	5.02.01.2.0 7.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	6 unit	46.944.00 0	46.850.000	94.000	99,80
V	5.02.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bln	439.768.0 00	425.050.67 2	14.717.328	96,65
1	5.02.01.2.0 8.01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000 surat	3.000.000	2.992.000	8.000	99,73
2	5.02.01.2.0 8.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bln	123.018.0 00	108.388.67 2	14.629.328	88,11
3	5.02.01.2.0 8.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	313.750.0 00	313.670.00 0	80.000	99,97
V	5.02.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daaeah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		139.771.3 50	139.761.91 0	9.444	99,99

NO	KODE REKENING PROGRAM /KEGIATAN	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	TARG ET KINER JA	ANGGAR AN	REALISASI	SISA ANGGARA N	%
1	5.02.01.2.0 9.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 unit	25.801.50 0	25.801.500	0	100
2	5.02.01.2.0 9.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan , pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	59 unit	50.007.20 0	49.997.960	9.240	99,98
3	5.02.01.2.0 9.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	55 Unit	40.000.00 0	40.000.000	0	100
4	5.02.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 unit	10.000.20 0	10.000.000	200	100
5	5.02.01.2.0 9.10	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	5 unit	13.062.45 0	13.062.450	0	100
6	5.02.01.2.0 9.11	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan	23 unit	900.000	900.000	0	100

NO	KODE REKUNING PROGRAM /KEGIATAN	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
		prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya					
	5.02.04.2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		958.703.000	958.703.000		
1	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		958.703.000	939.379.900	19.323.100	97,98
1	5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	2 dokumen	32.850.000	30.927.100	1.922.900	94,15
2	5.02.04.2.01.02	Analisa dan pengembangan pajak daerah , serta penyusunan kebijakan pajak daerah	6 dokumen	59.787.000	57.192.472	2.594.528	95,66
3	5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	240 unit	82.000.000	81.087.000	913.000	98,89
4	5.02.04.2.01.04	Penyediaan saraana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	1 unit	58.800.000	57.239.928	1.560.072	97,35
5	5.02.04.2.01.05	Pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah	150 data	41.740.700	41.650.300	90.400	99,78

NO	KODE REKUNING PROGRAM /KEGIATAN	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
6	5.02.04.2.0 1.06	Pengolahan pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	300 data	25.505.000	25.505.000	0	100
7	5.02.04.2.0 1.07	Penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	12 bulan	9.425.000	9.259.000	166.000	98,24
8	5.02.04.2.0 1.08	Penetapan wajib pajak daerah	700.000 data	270.913.400	269.879.900	1.033.500	99,62
9	5.02.04.2.0 1.09	Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	12 bulan	6.880.000	6.870.750	9.250	99,87
10	5.02.04.2.0 1.10	Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	12 bulan	7.935.900	7.884.500	51.400	99,35
11	5.02.04.2.0 1.11	Penagihan pajak daerah	12 kegiatan	157.289.000	147.155.100	10.133.900	93,56
12	5.02.04.2.0 1.12	Penyelesaian keberatan pajak daerah	80 permohonan	25.250.000	25.234.400	15.600	99,94
13	5.02.04.2.0 1.13	Pengendalian , pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	12 kegiatan	172.164.000	172.016.450	147.550	99,91

N O	KODE REKENING PROGRAM /KEGIATA N	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	TARG ET KINER JA	ANGGAR AN	REALISASI	SISA ANGGARA N	%
1 4	5.02.04.2.0 1.14	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	1 kegiata n, 4 kegiata n	8.163.000	7.478.000	685.000	91,61

Dari tabel 3.21 anggaran 2021, bahwa secara asumsi rata-rata capaian anggaran sebesar 97,89% semua kegiatan tercapai melebihi dari 85%.

Badan Pengelolaan pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang dalam penggunaan sumber daya listrik dan air dalam tahun 2021 menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel : 3.9

**Realisasi Penggunaan Energi Listrik
Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021**

No	Bulan	Penggunaa n (KWH)	Biaya (Rp)	Penghemat an Penggunaa n	Penghemat an Biaya	Ket
1	Januari		6.226.239	-	-	-
2	Pebruari		5.719.150	-	-	-
3	Maret		5.381.090			-
4	April		7.156.626			-
5	Mei		6.048.541			-
6	Juni		5.800.052			-
7	Juli		7.396.446			-
8	Agustus		5.938.744			-

9	September		5.872.287			-
10	Oktober		6.980.372			--
11	November		7.592.926			-
12	Desember		6.323.033			-
	JUMLAH		76.435.506			

Dalam tabel diatas adanya penghematan penggunaan energi listrik Bapenda Kabupaten Pemalang pada tahun 2021 dengan anggaran Rp.86.318.000,00 ,realisasi pembayaran dari Januari sampai dengan Desember 2021 sebesar Rp.76.435.506,00 adanya penghematan Rp.9.882.494,00 atau 11,45 % karena efisiensi penggunaan komputer/laptop dan penggunaan lampu pada siang hari, adapun rincian biaya tiap bulan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel : 3.10
Realisasi Penggunaan Energi Air (PDAM)
Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021

No	Bulan	Pemakaian (m3)	Biaya (Rp)	Penghematan penggunaan	Penghematan Biaya
1	Januari		105.300		
2	Pebruari		74.300		
3	Maret		92.900		
4	April		105.300		
5	Mei		141.600		
6	Juni		93.400		
7	Juli		99.600		
8	Agustus		141.600		
9	September		50.000		
10	Oktober		186.000		
11	November		86.700		
12	Desember		87.200		
	JUMLAH		1.263.900		

Dalam tabel diatas adanya penghematan penggunaan energi air (PDAM) Bapenda Kabupaten Pemalang pada tahun 2021 dengan anggaran Rp.2.700.000,00 realisasi pembayaran dari Januari sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp.1.263.900,00 adanya penghematan Rp.1.436.00,00 atau 53,19 %

C. INOVASI

Inovasi yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang dalam meningkatkan kinerjanya yaitu :

- 1 Adanya kebijakan dihapusnya denda pajak sampai tanggal 31 Desember 2021;
2. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dilakukan dengan pengadaan dan pengembangan aplikasi .
- 3 Penyusunan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.;
- 4 Bapenda Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan kinerjanya dengan slogan yaitu sebagai berikut :





- LAPAK MURAH : Layanan Pajak Mudah , Sederhana dan Ramah
- SUMEH : Selalu Melayani dengan Hati
- MENTARI : Mendata Setiap Hari
- TTM : Tepat Waktu Tepat Mutu
- NO KORUPSI : Tidak Gratifikasi
- JUDIKA : Jujur Harga Diri Kami

7 Pelaksanaan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah dengan menerapkan protokol kesehatan dengan pengecekan suhu badan dan 3 M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak)







BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan tugas antar bidang-bidang dan sekretariat Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang, sehingga tercapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana tercantum dalam Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 dan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021.

Pada APBD Tahun Anggaran 2021 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang mendapatkan alokasi sebesar Rp. 11.744.377.000,00 dan terserap sebesar Rp.11.496.818.319,00 atau 97,89 % efisiensi sebesar Rp.247.558.681,00 atau (2,11%), untuk membiayai 2 program , 6 kegiatan dan 40 sub kegiatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bapenda Kabupaten Pemalang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai koordinator untuk merumuskan kebijakan dalam hal Pendapatan Asli Daerah, dan melaksanakan kewenangannya dalam pemungutan pajak daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (Sewa Tanah Eks Bondo Desa). Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target Rp.307.180.542.000,00 realisasinya Rp.365.401.063.510,00 (118,95%) yang dikelola Bapenda Kabupaten Pemalang yaitu **11 Pajak Daerah dari target Rp.82.822.262.000,00, realisasi Rp.88.731.761.139,00,- (107,14%) dan Lain-lain Pendapapatan Asli Daerah (Sewa tanah eks bondo desa) target Rp.3.750.000.000 dengan realisasi Rp.3.095.888.341,00,- (82,56 %)**

Hasil laporan kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2021 sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan RPJMD Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Indikator Rasio realisasi PAD terhadap potensi/target PAD

Tahun 2021 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang menargetkan sebesar 7,80%, untuk indikator Rasio realisasi PAD terhadap potensi/target PAD adapun realisasinya adalah sebesar 6,07%.

Indikator Peningkatan/Pertumbuhan PAD Tahun 2021 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang menargetkan sebesar 6,20%, untuk indikator Peningkatan/Pertumbuhan PAD adapun realisasinya adalah sebesar 10,13%.

Capaian indikator Kinerja atas Perjanjian Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi indikator (%)	Keterangan
1	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisien dalam pemanfaatan APBD	1 Rasio Realisasi PAD terhadap potensi/target PAD	7,80	6,07	Bapenda
		2 Peningkatan Pertumbuhan PAD	6,20	10,13	

Pemalang, 31 Desember 2020

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



Drs. MUBARAK AHMAD, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690121 199001 1 001